

BAB V

KESIMPULAN

Taiwan merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari China ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur China yang beribu kotakan di Taipei. Secara resmi memang banyak negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu negara yang berdaulat karena China sendiri selalu melaksanakan *One China Policy* kepada negara-negara lain di dunia. Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara oleh sebagian besar negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Hal ini membuat banyak negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan, perekonomian, dan ketenaga kerjaan dengan Taiwan termasuk Indonesia.

Hubungan negara Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan yang terbilang unik. Keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Indonesia menganut Kebijakan Satu China (*One China Policy*), tetapi kerjasama Indonesia - Taiwan berjalan relatif baik, bahkan menunjukkan banyak kemajuan. Kini Indonesia - Taiwan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan tenaga kerja hingga pendidikan. Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 1960.

Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy*. Artinya, secara *de jure* Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari China. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah RRC (Republik Rakyat China) baik hubungan diplomatik maupun hubungan kerjasama ekonomi.

Taiwan merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup diperhitungkan. Banyak sekali hubungan kerjasama perdagangan yang telah dijalin dengan Taiwan diberbagai bidang. Mulai dari bidang perdagangan dan perekonomian, investasi-investasi perusahaan Taiwan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kepariwisataan. Kesemua aspek tersebut sangat menguntungkan baik bagi Indonesia maupun bagi Taiwan.

Taiwan, nama resmi *Republic of China* (ROC), adalah negara yang paling padat penduduknya yang bukan anggota dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), dan salah satu dengan perekonomian terbesar. Republik China (ROC) didirikan di daratan pada tahun 1912 setelah jatuhnya dinasti Qing. ROC (*Republic of China*) sebagai anggota pendiri PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), terus mewakili China di (Perserikatan Bangsa - Bangsa) PBB sampai tahun 1971. Namun ketika RRC (Republik Rakyat China) diasumsikan kursi China, sejak saat itu ROC (*Republic of China*) kehilangan keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)-nya.

RRC (Republik Rakyat China) secara konsisten telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan menegaskan ROC (*Republic of China*) adalah tidak sah. Di bawah Kebijakan Satu China, RRC (Republik Rakyat China) menolak hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui (*Republic of China*) ROC. Hanya beberapa negara yang lebih kecil mengakui ROC (*Republic of China*) sebagai wakil tunggal hukum China. Tetapi banyak juga negara-negara lain yang mempertahankan hubungan tidak resmi melalui kantor perwakilan dan lembaga yang berfungsi sebagai *de facto* kedutaan dan konsulat.

Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan memenangkan pengakuan pada tahun 1949, Indonesia sempat mengakui Republik China antara periode 1949 sampai 1950.

Pada tahun 1950 Indonesia bergeser pengakuan resmi terhadap Republik Rakyat China dan memilih untuk Kebijakan Satu China. Indonesia seperti negara-negara lainnya tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Republik Tiongkok. Namun hubungan Indonesia dengan Taiwan sudah terjalin sejak 1967. Tahun 1970 Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Taipei secara resmi dibentuk. Hubungan ekonomi menjadi salah satu misi utama KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Taipei. Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan status KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Taiwan menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan pada tanggal 7 Juli 1994, dan KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) secara resmi dibina di bawah naungan Departemen Perdagangan. Sebelum ini, (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) KADIN masih berada di bawah binaan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Status KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) adalah lembaga non-pemerintah yang bersifat ekonomi, namun melingkupi perdagangan dan imigrasi. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) juga bertugas melindungi kepentingan warga negara Indonesia yang berdomisili di Taiwan, yang mayoritas berstatus tenaga kerja ataupun mahasiswa dan pelajar.

Untuk menghadapi persaingan globalisasi, transparansi perdagangan dan pasar bebas, juga perubahan jaringan perdagangan yang kian cepat, maka dibentuklah sebuah organisasi, (*Taiwan External Trade Development Council*) TAITRA. TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*) adalah penggabungan organisasi masyarakat berbadan hukum di bawah naungan Biro Perdagangan Luar Negeri dengan tujuan membantu industri Taiwan memperluas perdagangan. Berharap dengan adanya TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*) akan semakin meningkatkan kemampuan pemasaran internasional dari berbagai sudut, memberikan layanan yang paling cepat dan efektif, secara *continue* berkerjasama dengan pengusaha untuk perkembangan ekonomi Taiwan yang stabil.

Kebijakan *One China Policy* yang dipegang Indonesia diakui menjadi salah satu sandungan dalam menjalin hubungan Taiwan dan Indonesia. Hubungan sensitif antara Indonesia – Taiwan pun tergambar jelas oleh beberapa peristiwa belakangan ini. Seperti pada tahun 2010, KDEI(Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) di Taiwan mendapatkan surat dari *Food and Drugs Administration* (FDA) Taiwan yang memberitahukan mie instan produk Indofood tidak sesuai persyaratan FDA (*Food and Drugs Administration*). Dalam kasus lain, bidang perdagangan menerima surat pemberitahuan dari Departemen Kesehatan Taiwan mengenai impor produk gula merah dan permen asal Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan Taiwan karena mengandung bahan pemutih yang melebihi standar yang ditentukan dan pewarna buatan yang tidak diizinkan.

Di tahun yang sama, 2010, hubungan antara Indonesia dan Taiwan tidak sebaik sebelumnya. Menurunnya hubungan secara drastis ini lebih kepada perilaku dan sikap Taiwan yang berada pada dilema antara persoalan geopolitik dan geoekonomi. Keseluruhan perilaku Taiwan berubah dengan menggunakan ancaman ekonomi untuk memperoleh keuntungan diplomasi. Gagalnya kunjungan pemimpin Taiwan Chen Sui Bien untuk maksud bisnis pada bulan desember tahun 2002 membuat pemerintahan Taiwan berencana melakukan Boikot Ekonomi dan Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara tujuan investasi Taiwan. Tetapi hal semacam ini sangat sulit dilakukan dan mungkin hanya sebatas wacana dikarenakan sudah terlalu kuatnya pengaruh perekonomian Indonesia terhadap Taiwan. Banyaknya kerjasama dan investasi disegala bidang diantara keduanya menyebabkan hal semacam itu sangat sulit untuk dilakukan Taiwan dalam rangka memnggoyahkan kebijakan luar negeri yang dianut Indonesia yaitu *One China Policy*. Meskipun Indonesia – Taiwan mengalami surplus, pemerintah Taiwan tetap konsisten akan meningkatkan jumlah investasi dan kunjungan wisata kedua negara.

Adapun sejarah awal mula *One China Policy*. Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan tidak serta merta membuat kondisi perpolitikan di China membaik. Justru hubungan diplomatik diantara China dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari China, Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara China. Pemerintah China, lantas mengeluarkan kebijakan yang dinamakan *One China Policy* dimana kebijakan ini mengeluarkan bunyi yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada Satu China yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari China dan tidak dianggap negara yang membentuk dirinya dia sendiri di luar China. Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatik dengan China harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan China.

One China Policy membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah China. Namun, ternyata kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari Taiwan. Mereka tidak menginginkan untuk bergabung ke dalam China di bawah satu pemerintahan. Taiwan menganggap bahwa daerahnya adalah negara yang berdaulat karena secara *de facto*, Taiwan sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara. Namun, reaksi dari Taiwan tidak serta merta membuat China harus membatalkan kebijakan yang telah dibuat. China malah membuat aturan main yang ketat bagi para negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China. Bahwa tidak boleh menjalin hubungan dengan Taiwan apabila negara lain ingin membangun hubungan diplomatik dengan China. Atau dalam kata lain, negara yang ingin bekerjasama dengan China harus mematuhi kebijakan *One China Policy* tersebut.

Penerapan kebijakan luar negeri *One China Policy* merupakan langkah wajib yang tidak main-main untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintahan RRC (Republik Rakyat

China). *One China Policy* merupakan persyaratan untuk setiap entitas politik untuk membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China.

Adapun implikasi *One China Policy* terhadap hubungan Indonesia – Taiwan seperti kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia – Taiwan, kerjasama di bidang lain, adanya kebijakan Indonesia terhadap Taiwan, dan adanya kebijakan luar negeri Taiwan (Indonesia).

Peningkatan kerjasama merupakan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taiwan. Dalam kerjasama tersebut, Taiwan banyak melakukan investasi dan perdagangan dengan Indonesia, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Taiwan merupakan mitra penting bagi Indonesia. Terdapat alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia menjadikan Taiwan sebagai mitra pentingnya. Salah satu alasannya adalah Taiwan termasuk dari salah satunya Macan Asia. Melalui Taiwan yang memiliki peran penting dalam kawasan perekonomian Asia, Indonesia memanfaatkan hal tersebut melalui menarik perhatian investor asing Taiwan untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap Indonesia.

Adanya nilai yang cukup besar di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, pendidikan serta Sumber Daya Manusia merupakan daya tarik tersendiri bagi kedua negara ini. Dan adanya nilai-nilai di atas, menjadikan dasar yang kuat untuk membangun persahabatan antara Taiwan dengan Indonesia.

Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-9 bagi Indonesia dan investor terbesar ke-10. Dan Indonesia sendiri menjadikan Taiwan sebagai negara partner kerjasama perdagangan yang sangat baik. Selain bidang perekonomian, masih banyak kerjasama dalam bidang lain yang

terjalin antara pemerintah Indonesia dan Taiwan. Salah satu bidang yang juga menguntungkan bagi

Taiwan juga merupakan salah satu investor besar dari Asia di Indonesia. Saat ini, Taiwan mampu bersaing dengan negara-negara maju termasuk di bidang teknologi komunikasi dan produk-produknya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat ekspor produk-produk unggulan Taiwan ke Indonesia. Produk-produk IT (Ilmu Teknologi) Taiwan seperti ponsel, komputer dan laptop unggulan mereka sudah banyak sekali dipasarkan di Indonesia. Selain itu juga banyak sekali produk-produk berupa mesin industri diekspor ke Indonesia.

Seriusnya hubungan perekonomian antara Indonesia – Taiwan tercermin dari adanya naik turun pada neraca investasi dan perdagangan dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Meskipun adanya pasang surut atau naik turun pada neraca perdagangan dan investasi, tak menggoyahkan hubungan kerjasama Indonesia – Taiwan yang tetap terjalin baik.

Selama ini, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, industrialisasi merupakan ‘primadona’ dalam usaha pembangunan negaranya khususnya dari strategi perbaikan kondisi perekonomian. Pergeseran kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto pada tahun 1966 membuka cakrawala baru bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik. Pada saat itu, kondisi ekonomi Indonesia sangat parah dimana kondisi ini ditandai dengan tingginya tingkat inflasi yang mencapai ratusan persen per tahun serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah (bahkan negatif), utang luar negeri yang menumpuk dan tidak bisa diangsur kembali dengan hasil ekspor yang nilainya hanya beberapa ratus dolar per tahun.

Tahun 2005 - 2009 adalah masa pemulihan dan pengembangan industri setelah krisis. Revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri masih menjadi salah satu fokus pengembangan industri berkeunggulan kompetitif dengan pendekatan kluster. *Taiwan External*

Trade Development Council (TAITRA) memprediksi pada tahun ini (2017) Indonesia akan menjadi negara tujuan ketiga untuk produksi industri Taiwan setelah China dan Vietnam. Dengan adanya Taiwan melakukan investasi dengan membuka industrial di Indonesia, itu menandakan bahwa Taiwan telah melakukan bisnis Internasional bersama Indonesia.

Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya (*optimum profit*). Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, dan mengacu pada tiga misi utama industri nasional yaitu 1) pertumbuhan ekonomi di atas 7%, 2) peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa, dan 3) penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam dua dekade terakhir ini perlu diakui bahwa Indonesia mengalami perkembangan Industri yang cukup cepat. Stabilitas politik yang berdampak pada stabilitas ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong. Hal ini berdampak tentunya pada semakin membaiknya iklim ekonomi di Indonesia. Perkembangan yang cukup terlihat saat ini adalah semaraknya perkembangan industri.

Meskipun pertumbuhan industri cukup menggembirakan, ada konsekuensi yang harus dibayar yakni defisit dalam neraca perdagangan sektor industri. Jika pertumbuhan industri berbanding lurus dengan peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal, hal ini sangat mengkhawatirkan karena industri manufaktur di dalam negeri Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Taiwan ataupun negara lain. Indonesia tidak perlu anti impor, tetapi ketergantungan yang terlalu tinggi ini perlu dikurangi dengan mengandalkan sumber daya di dalam negeri.

Menurut penulis, dengan Taiwan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi industrinya akan sangat menguntungkan Indonesia yang mana akan mengangkat perindustrian Indonesia

karena perusahaan Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia jumlahnya akan semakin bertambah nantinya. Selain dapat mengangkat perindustrian Indonesia, investasi tersebut akan membantu memajukan perekonomian di kedua negara baik di Indonesia maupun di Taiwan. Lahan industri di Indonesia kini sudah banyak, serta kemudahan dalam mendapatkan suplai listrik dan juga biaya buruh di Indonesia memadai dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah mengatur semua itu, karena telah dibuatnya UU ketenagakerjaan dan juga UU investasi asing dalam berbisnis di Indonesia.